

The Analysis Correlational Maritime Culture Towards Fisheries Resources Management

(A Case Study at Pangandaran Region Sub District Ciamis West Java)

ABSTRACT

Atikah Nurhayati ⁽¹⁾ Ine Maulina ⁽²⁾

atikah.nurhayati@unpad.ac.id

ine.maulina@unpad.ac.id

This research aims to the analysis correlational maritime culture towards fisheries resources management (A case study at Pangandaran Region Sub District West Java). This review of background by socio-economic conditions of fishing communities that have suffered degradation in the management of fisheries resources. The method used is survey and sampling techniques conducted purposive sampling. The analysis model used is analysis correlation with the quantitative description. The research result that the factors that form the culture of marine fishing communities by internal and external factors on the fishing community and there is correlational maritime cultural towards fisheries resources management.

Keyword :maritime culture,management, fisheries resources.

(1),(2) Lecture at faculty of fisheries and marine sciene , padjadjaran university

Analisis Hubungan Budaya Bahari Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

(Suatu Kasus di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat)

ABSTRAK

Atikah Nurhayati ⁽¹⁾ Ine Maulina ⁽²⁾

atikah.nurhayati@unpad.ac.id

ine.maulina@unpad.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan (Suatu Kasus di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat). Pengkajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi komunitas nelayan yang telah mengalami degradasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. Metode yang digunakan adalah metode *survey* dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Model analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dengan pendekatan deskripsi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membentuk budaya bahari pada komunitas nelayan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal pada komunitas nelayan dan terdapat hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan.

Kata kunci : budaya bahari, pengelolaan, sumberdaya perikanan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kawasan Pangandaran kabupaten Ciamis merupakan salah satu tujuan wisata bahari dan sentra produksi sumberdaya perikanan tangkap di Propinsi Jawa Barat. Wisata bahari di Kawasan Pangandaran memiliki hubungan dengan kelestarian dan lingkungan alam, kehidupan masyarakat dan kebudayaan di wilayah pesisir Pangandaran.

Profesi sebagai nelayan menjadi pilihan terakhir masyarakat pesisir, dikarenakan tidak adanya peluang kerja di daratan (*push factor theory*). Selain itu, juga bersifat *given*, bahwa profesi nelayan menjadi *the way of live* yang diturunkan dari generasi ke generasinya. Kehidupan komunitas nelayan di Kawasan Pangandaran tidak bersifat individual tetapi berkelompok. Kegiatan penangkapan ikan tidak terlepas dari budaya daerahnya. Budaya komunitas nelayan akan membentuk pola hidup dan pola pikir nelayan itu sendiri. Kondisi budaya ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan nelayan dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai nelayan.

Kegiatan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh budaya lokal setempat, seperti pemanfaatan sistem pengetahuan lokal, sistem sosial budaya dan sistem *religi* dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di laut. Sifat sumberdaya lautan *open access* dan *open user* sering menyebabkan konflik sosial di kalangan komunitas nelayan. Penggunaan sumberdaya perikanan tangkap yang kurang bertanggung jawab, karena masyarakat masih beranggapan bahwa mereka bebas untuk mengambil sumberdaya yang ada tanpa kendali sehingga menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya perikanan.

Kondisi sosial budaya bahari pada komunitas nelayan sangat kompleks baik dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri nelayan itu sendiri dan faktor eksternal yang meliputi dinamika kelembagaan komunitas nelayan dan kondisi pasar produk perikanan.

Kawasan Pangandaran kabupaten Ciamis merupakan salah satu sentra produksi perikanan tangkap di Propinsi Jawa Barat. Budaya Bahari dan Kearifan Lokal (*Maritime Culture and Local Wisdom*) pada komunitas nelayan di Kawasan Pangandaran sudah mengalami degradasi dalam mengelola sumberdaya perikanan, hal ini diakibatkan oleh adanya warga pendatang yang menempati Kawasan Pangandaran seperti penduduk yang berasal dari luar daerah Pangandaran.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang membentuk budaya bahari pada komunitas nelayan di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.
2. Sejauhmana hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan di Kawasan Pangandaran Kabupaten Caimis Propinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah menganalisis budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis faktor-faktor apa yang membentuk budaya bahari pada komunitas nelayan di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.
2. Mengkaji hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk :

1. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan.
2. Bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis komunitas.
3. Dasar pertimbangan ilmiah bagi perencana dan pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah, dalam rangka mengelola sumberdaya perikanan berbasis komunitas.

II. Kajian Pustaka

2.1. Budaya Bahari dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai ”pedoman kehidupan”, referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989:68-69), sedangkan kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai ide yang dituangkan dalam bentuk gagasan pada komunitas setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, arif, dan tata nilai yang baik, tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat khususnya komunitas nelayan.

Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Kegiatan manusia memperlakukan lingkungan alamiahnya, itulah kebudayaan. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya. Kebudayaan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan (Van Peursen, 1976:10-11). Kebudayaan merupakan jalan atau arah didalam bertindak dan berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani.

Pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan (Gadgil, *et al.*, 1993). Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional (Mitcheli, 1997). Salah satu contoh kearifan lokal yaitu *Seke* adalah mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang dijumpai di desa Para, Kabupaten Sangihe. Wahyono, *et al.*, (2000), menyatakan bahwa masyarakat Para mengenal tiga jenis wilayah perairan yang dijadikan tempat penangkapan ikan (*fishing ground*), yaitu: *sanghe*, *inahe* dan *elie*. *Sanghe* adalah suatu wilayah laut tempat terumbu karang (bahasa lokal: *nyare*), di mana banyak dihuni ikan-ikan karang. *Inahe* adalah wilayah perairan yang batas antara *sanghe* dan *elie*, sedangkan *elie* adalah wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan (*offshore*).

Dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal. Secara fisik, bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, masuknya peralatan baru, mudahnya akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dalam lingkup hubungan antar manusia, hubungan individual dan kelompok dapat juga mempengaruhi perubahan kebudayaan. Satu hal yang tidak bisa dihindari bahwa perkembangan dan perubahan akan selalu terjadi. Di kalangan antropolog ada tiga pola yang dianggap paling penting berkaitan dengan masalah perubahan kebudayaan: *evolusi*, *difusi*, dan *akulturasi*. Landasan dari semua ini adalah penemuan atau inovasi. (Lauer, 1993:387). Satria, A, (2004), mengatakan bahwa secara teologis, memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan semakin terjamin.

2.2. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas

Pengelolaan perikanan yang sebelumnya bersifat tersentralisir berubah menjadi desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 3 UU No. 22/1999 disebutkan bahwa wilayah daerah provinsi terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Sedangkan, pasal 10 UU No. 22/1999 menyebutkan kewenangan daerah kabupaten/kota sejauh sepertiga dari batas laut provinsi. Namun hingga saat ini masih belum ada aturan secara umum yang jelas untuk diterapkan di daerah bahkan secara nasional (Nikijuluw, 2002)

Menurut FAO dalam Robert Pomeroy, dkk. (2009) dalam Nurhayati, A (2011) “*managing fisheries in a manner that addresses multiple needs and desires of society, without jeopardizing options for future generations, to benefit from the full range of goods and services provided by marine ecosystems*”. Lackey (1998) dalam Nurhayati, A (2011) *Fisheries management has been defined as “the practice of analyzing and selecting options to maintain or alter the structure, dynamics, and interaction of habitat, aquatic biota, and man to achieve human goals and objectives”*. Pada definisi tersebut pada prinsipnya pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak sumberdaya perikanan tersebut untuk generasi yang akan datang.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based Management* (CBM) menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Lawson (1984) dalam Nikijuluw (2002), beberapa kelemahan dari rezim pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis pemerintah, adalah: (1) kegagalan mencegah *over exploitation* sumberdaya perikanan; (2) kegagalan dalam penegakkan hukum; (3) kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghindari dari peraturan perundang-undangan; (4) kebijakan yang tidak tepat; (5) administrasi yang tidak efisien dalam bentuk biaya transaksi yang cukup tinggi; (6) kewenangan yang terbagi-bagi kepada beberapa lembaga pemerintahan; (7) data dan informasi yang diperoleh kurang akurat; dan (8) kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen dalam mengatasi masalah-masalah di lapangan.

Dalam konteks hubungan eksploitasi sumberdaya perikanan, masyarakat nelayan kita memerankan empat perilaku sebagai berikut: (1) mengeksploitasi terus-menerus sumberdaya perikanan tanpa memahami batas-batasnya; (2) mengeksploitasi sumberdaya perikanan,

disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut; (3) mengeksploitasi sumberdaya perikanan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti *trawl* atau *minitrawl*; serta (4) mengeksploitasi sumberdaya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan. (Kusnadi, 2009:126-127).

III. Metode Penelitian

3.1. Metode dan Objek Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan mengambil sampel secara *purpurposive* 30 nelayan di Kawasan Pangandaran Propinsi Jawa Barat. Data yang dianalisis adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari literatur dan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara petugas kelautan dan perikanan Propinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus – September 2010.

3.2. Metode Analisis

- 3.2.1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang membentuk budaya bahari pada komunitas nelayan di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat menggunakan metode deskripsi kuantitatif.
- 3.2.2. Untuk mengkaji hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir menggunakan skala likert dan dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan *software* SPSS versi 15.

Tabel 1 . Skala Likert dengan kriteria pembobotan nilai:

Kriteria	Nilai
Sangat berhubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan	5
Ada hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan	4
Ada sedikit hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan	3
Tidak ada hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan	2
Sama sekali tidak ada hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan	1

Hipotesis :

Ho : Tidak ada hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan.

H1 : Ada hubungan budaya bahari terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1. Keadaan Umum Tempat Penelitian

Wilayah pesisir yang terdiri dari enam kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis lebih dikenal sebagai Kawasan Pangandaran. Keenam kecamatan tersebut masing-masing memiliki daerah pariwisata pantai dan potensi perikanan tangkap. Keenam kecamatan tersebut adalah : Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, dan Kalipucang.

Secara geografis wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 108^o 40 ‘ Bujur Timur dan 7^o 20’ Lintang Selatan dengan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 2.488 Km². Secara administratif Kabupaten Ciamis berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Majalengka dan Kuningan, sebelah barat Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah timur dengan Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

4.2. Faktor-Faktor Yang Membentuk Budaya Bahari

Pada awalnya Desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di Pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung, Tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Di sinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa sundanya disebut ”*andar*“ setelah beberapa lama banyak pendatang berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pangandaran berasal dari dua buah kata “pangan” dan “daran” . yang artinya “pangan” adalah makanan dan “daran” adalah pendatang. Jadi Pangandaran artinya sumber makanan bagi para pendatang.

Pekerjaan nelayan tidak bisa dilakukan sambil lalu tanpa kesungguhan. Setiap nelayan dalam melakukan kegiatan di laut memerlukan ketekukan, keuletan dan kerja keras, hal inilah yang menjadi salah satu pembentuk budaya bahari pada komunitas nelayan. Pada umumnya nelayan dalam melakukan pekerjaan berhadapan dengan tantangan dan cobaan terkait dengan kehidupan di laut, kemungkinan terjadinya ombak, badai, hujan dan air pasang disertai angin kencang, dan sejumlah peristiwa alam kelautan. Profesi sebagai nelayan sudah menjadi pekerjaan

utama masyarakat pesisir secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya yang didasari budaya setempat yaitu budaya bahari.

Faktor-faktor yang membentuk budaya bahari ditentukan oleh faktor internal dan eksternal pada komunitas nelayan di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Faktor Faktor Yang Membentuk Budaya Bahari di Kawasan Pangandaran

Faktor Internal	Keterangan
Umur	Umur seseorang memiliki pengaruh dengan tingkat kemampuan fisik untuk bekerja.
Pendidikan	Tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh terhadap pola pikir yang dimiliki, kemampuan merencanakan dan mengambil keputusan atas berbagai persoalan yang ada khususnya dalam mengelola sumberdaya perikanan.
Pengalaman sebagai nelayan	Semakin lama tingkat pengalaman seseorang dalam bidang pekerjaannya khususnya sebagai nelayan, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan kegiatannya sebagai nelayan.
Jenis Kelamin/gender	Sistem gender adalah sistem pembagian kerja secara seksual (<i>the division of labor by sex</i>) dalam masyarakat nelayan yang didasarkan pada persepsi kebudayaan yang ada
Faktor Eksternal	Unsur sosial yang berpotensi sebagai " <i>patron</i> " adalah pedagang (ikan) berskala besar dan kaya, nelayan pemilik (perahu), juru mudi (juragan laut atau pemimpin awak perahu), dan orang kaya lainnya. Mereka yang berpotensi menjadi " <i>klien</i> " adalah nelayan buruh (<i>pandhiga</i> , Madura) dan warga pesisir yang kurang mampu sumberdayanya. Sosial Hubungan ekonomi berbasis <i>patron-klien</i> ini berlangsung intensif dan dalam jangka panjang
Sistem <i>patron-klien</i>	
Pola Eksploitasi Sumberdaya Perikanan	(1) mengeksploitasi sumberdaya perikanan tanpa memahami batas-batasnya; (2) mengeksploitasi sumberdaya perikanan, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut; (3) mengeksploitasi sumber daya perikanan dengan cara-cara yang merusak (<i>destructive fishing</i>), dan (4) mengeksploitasi sumberdaya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi.
Terbatasnya alternatif <i>livelihood</i>	Nelayan tidak mampu memiliki mata pencaharian lain, keterbatasan tersebut antara lain tidak memiliki keahlian lain selain menjadi nelayan, terbatasnya peluang kerja bagi mereka dan kemampuan melihat peluang kerja yang rendah.
Kelembagaan Lokal Berbasis Komunitas Nelayan	Kelembagaan lokal berbasis komunitas nelayan akan menghimpun dan menyatukan persepsi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayahnya, seperti dengan melakukan konservasi pada wilayah yang telah mengalami kerusakan hutan mangrove dan menciptakan lapangan usaha ekonomi kreatif sehingga tidak merusak lingkungan.

4.3. Hubungan Budaya Bahari Terhadap Pengelolaan Sumberdaya

Nelayan di Kawasan Pangandaran secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yakni nelayan juragan/ pemilik perahu, buruh nelayan, dan nelayan perorangan. Nelayan juragan atau nelayan pemilik adalah pemilik alat tangkap, yaitu berupa perahu beserta peralatan tangkapnya seperti jaring. Buruh nelayan adalah mereka yang mengoperasikan alat tangkap bukan miliknya sendiri, yang di daerah setempat disebut *pandega* atau *bandega*. Sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, yang dalam pengopersiannya tidak melibatkan orang lain. Dari ketiga kategori nelayan tersebut, yang terbanyak jumlahnya di Kawasan Pangandaran adalah nelayan perorangan, dan kalaupun melibatkan Anak Buah Kapal (ABK) adalah anggota keluarganya sendiri atau masih terikat tali persaudaraan.

Kehidupan organisasi sosial masyarakat di permukiman nelayan dapat diketahui dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat penting terutama di dalam pembangunan. Melalui organisasi kemasyarakatan ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk mengelola sumberdaya perikanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah dengan menggunakan *software* spss diperoleh hasil pada Tabel 3 sebagai berikut .

Tabel 3. Hasil Perhitungan Statistik *Nonparametric Correlations*.

			B.Bahari	PSDP
Kendall's tau_b	B.Bahari	Correlation Coefficient	1.000	.461(**)
		Sig. (2-tailed)	.	.003
		N	30	30
	PSDP	Correlation Coefficient	.461(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.003	.
		N	30	30
Spearman's rho	B.Bahari	Correlation Coefficient	1.000	.546(**)
		Sig. (2-tailed)	.	.002
		N	30	30
	PSDP	Correlation Coefficient	.546(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.002	.
		N	30	30

Keterangan :

** *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*

B.Bahari : Budaya Bahari; PSDP : Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan

H1 : Ada hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan

Jika $\text{Sig} > \alpha$, maka Ho diterima

Jika $\text{Sig} < \alpha$, maka Ho ditolak

Nilai koefisien korelasi budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan menurut hasil Kendall sebesar 0,461 sedangkan menurut Spearman sebesar 0,546. Sig (0,003 untuk Kendall dan 0,002 untuk Spearman) $< \alpha$ (0,05) maka Ho ditolak. dan H1 diterima. Jadi ada hubungan antara kedua variabel

Aturan sosial yang mengikat komunitas nelayan diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap. Kearifan lokal yang dikatakan dapat mendukung usaha-usaha pengelolaan sumber daya laut antara lain: (1) adanya larangan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan pada setiap hari jumat itu berlaku di Kec.Kalipucang, Parigi, Cijulang dan Cimerak sedangkan di Kec. Pangandaran sudah mulai tidak berlaku ; (2) adanya perasaan sebagai bagian dari suatu komunitas untuk tujuan mengelola sumberdaya perikanan tangkap ; (3) masyarakat nelayan mengizinkan bagi nelayan dari daerah luar untuk menangkap ikan di daerah mereka dengan syarat mereka menghormati seluruh masyarakat yang tinggal di daerah dan menggunakan alat tangkap yang tidak merugikan nelayan-nelayan dari daerah setempat ;(4) adanya kesepakatan bagi para pelaku hal-hal yang merugikan nelayan lain, seperti aktivitas pencurian ikan, dan penggunaan alat tangkap yang akan menimbulkan kerusakan ekosistem.(Nurhayati, A; 2011).

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

1. Faktor pembentuk budaya bahari di Kawasan Pangandaran ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ; umur, pendidikan, pengalaman sebagai nelayan, jenis kelamin atau gender. Faktor Eksternal meliputi: sistem patron klien, pola eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap, terbatasnya alternatif *livelihood*, kelembagaan lokal berbasis komunitas nelayan
2. Sig (0,003 untuk Kendall dan 0,002 untuk Spearman) $< \alpha$ (0,05) maka Ho ditolak. Jadi ada hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.

5.2. Saran

1. Faktor pembentuk budaya bahari harus dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam memberdayakan komunitas nelayan.
2. Adanya hubungan antara budaya bahari dengan pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dijadikan fondasi bagi pemangku kebijakan dalam mengelola sumberdaya perikanan dengan melibatkan komunitas nelayan sebagai stakeholder utama dalam mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gadgil, M., F. Berkes., dan C. Folke. 1993. *Indigenous knowledge for biodiversity conservation*. *Ambio* 22 (2-3): 151 – 156.
- Keraf, A Sonny. 2003. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lauer, Robert H, 1993, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, alih bahasa: Alimandan, Rineka Cipta, Jakarta
- Mitchel, B. 1997. *Resource and enviromental management*. New York: Addison Wesley Longman, Ltd.,
- Nikijuluw, P.H. Victor dan N. Naamin. 1994. “*Current and future community based fishery management in Indonesia*”. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal*, 16(2): 19 -23.
- Nikijuluw, P.H. Victor. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Jakarta:Diterbitkan atas kerjasama P3R dengan PT. Pustaka Cidesindo
- Nurhayati, A. 2011. *Pengaruh Perilaku Ekonomi Nelayan Terhadap Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap*. Disertasi Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Satria, A., 2002, *Karakteristik Sistem Sosial Masyarakat Pesisir*, Kendari.
- Van Peursen, 1976, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.